



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



Kebijakan Pengadaan ASN 2021

*KATMOKO ARI S.
(PLT. ASDEP PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM APARATUR)*



1. KEBIJAKAN PENGADAAN ASN
2. MEKANISME PENGADAAN ASN
3. TIM PANSELNAS 2021
4. PROGRES PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN 2021
5. PENUTUP

OUTLINE

5 PRIORITAS KERJA TAHUN KE DEPAN 2019-2024



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- penghubung produksi dan distribusi
- mempermudah akses wisata
- mendongkrak lapangan kerja
- nilai tambah perekonomian

SIMPLIFIKASI REGULASI

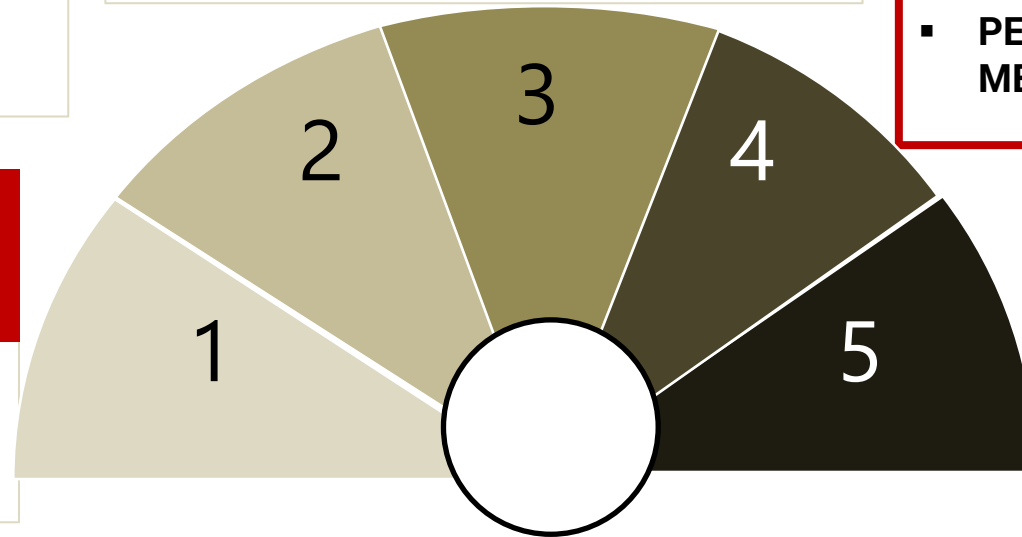
- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- **PENYEDERHANAAN BIROKRASI MENJADI 2 LEVEL ESELON**
- **PERALIHAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI FUNGSIONAL**

PEMBANGUNAN SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global



TRANSFORMASI EKONOMI

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi
- **Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran**

KONDISI ASN SAAT INI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

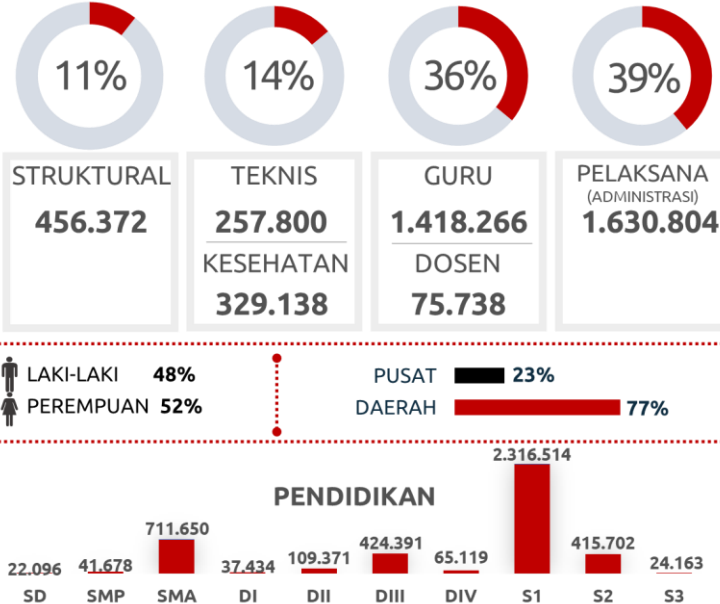
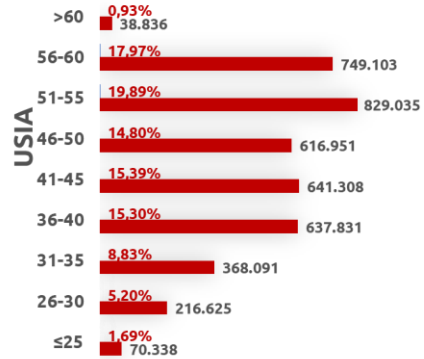


KOMPOSISI ASN

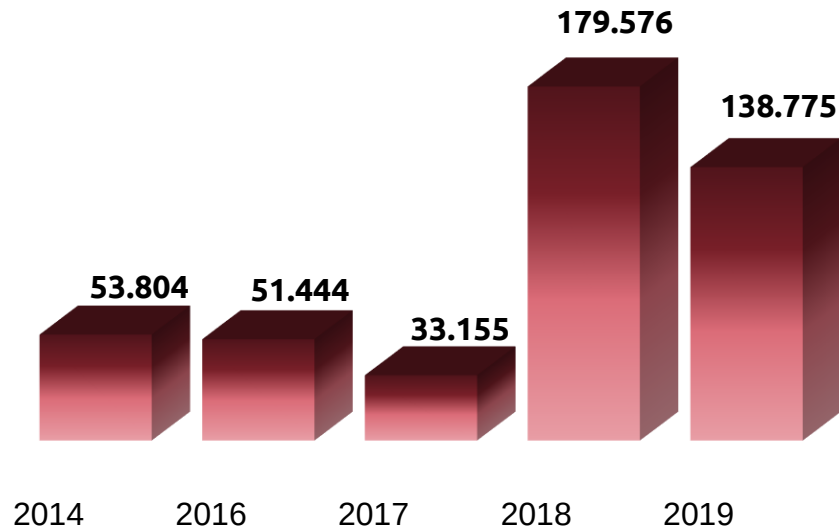
PNS INDONESIA

Posisi per Desember 2020

4.168.118

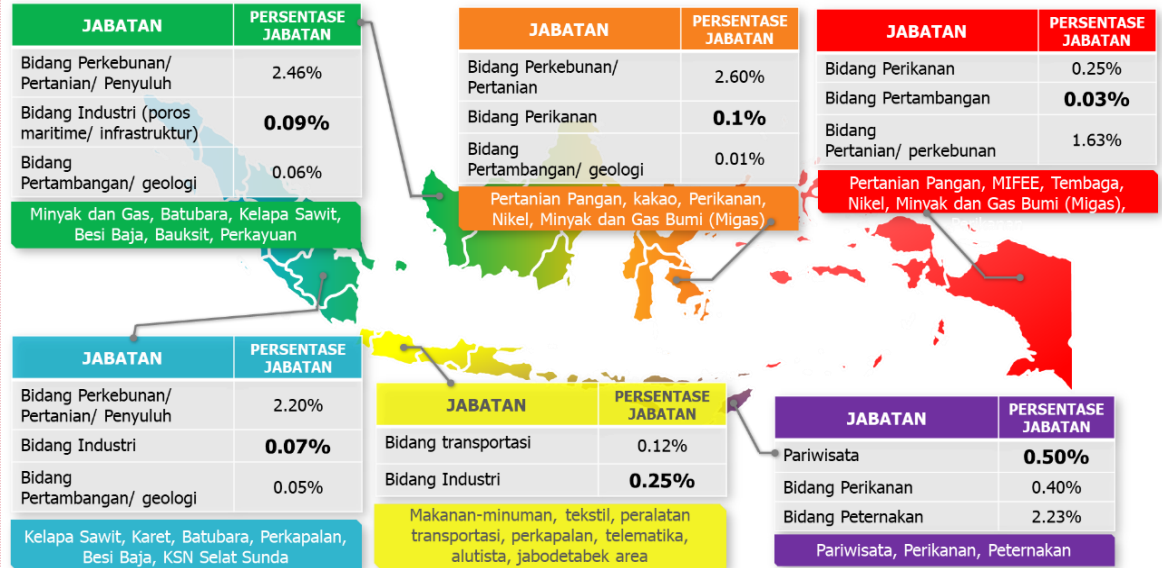


REKRUTMEN CPNS 2014-2019

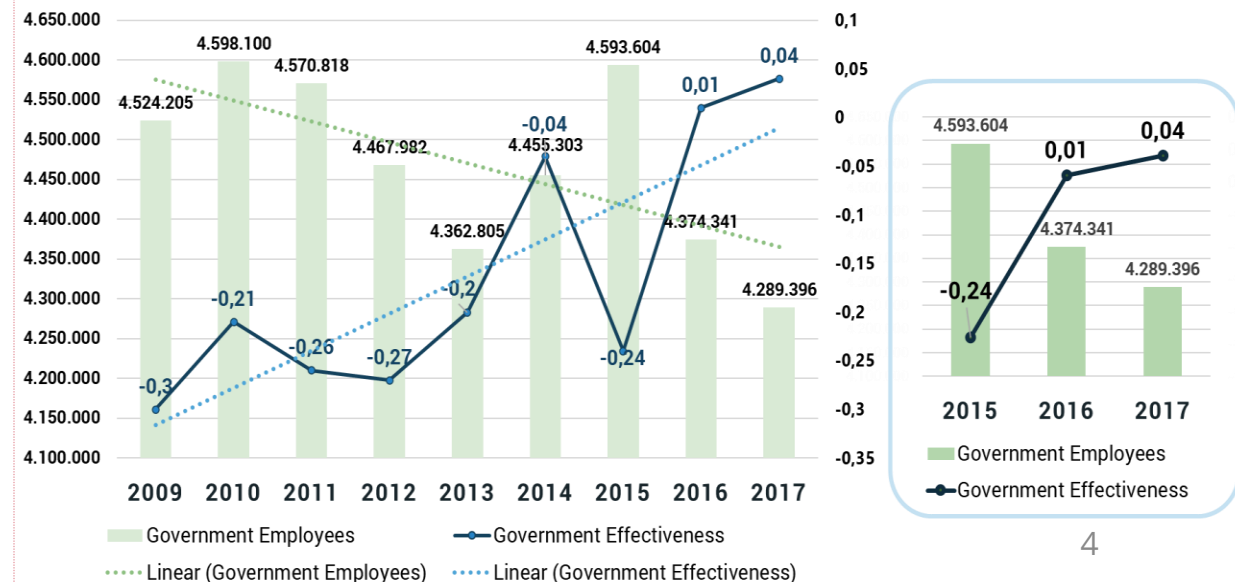


Sumber:
Kementerian PANRB (2017-2020)
BKN (2019-2020)
World Bank (2019)
"diolah"

MISMATCH SDM ASN DENGAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL



INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN JUMLAH ASN 2009-2017



ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



GOOD
GOVERNANCE

RPJM 1 (2005-2009)

REFORMASI
BIROKRASI

RPJM 2 (2010-2014)

SISTEM MERIT

RPJM 3 (2015-2019)

BIROKRASI
BERKELAS DUNIA 2024

RPJM 4 (2020-2024)



SMART ASN 2024

profil

INTEGRITAS

- NASIONALISME
- PROFESIONALISME
- WAWASAN GLOBAL
- IT & BAHASA ASING
- HOSPITALITY
- NETWORKING
- ENTREPRENEURSHIP

KEBIJAKAN PENGADAAN CASN TAHUN 2021

UNTUK SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

1. PROGRAM WAJIB

- ☐ KESEHATAN
- ☐ PENDIDIKAN
- ☐ PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2. PROGRAM PRIORITAS

- ☐ PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
- ☐ PEMBANGUNAN POROS MARITIM
- ☐ PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI
- ☐ PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

3. PROGRAM DUKUNGAN

- ☐ REFORMASI BIROKRASI



FORMASI CASN DIPRIORITASKAN PADA :

- ✓ TENAGA GURU
- ✓ TENAGA KESEHATAN
- ✓ TENAGA TEKNIS

DENGAN MEMPERHATIKAN :

- ✓ ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DAN POTENSI DAERAH
- ✓ CORE BUSINESS INSTANSI
- ✓ PENATAAN DAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI
- ✓ OPTIMALISASI PEMANFAATAN IT
- ✓ DAMPAK PANDEMI COVID-19

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN

PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK mengatur:

- Rincian usulan kebutuhan ASN tahun berikutnya disampaikan oleh PPK kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN **paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya**
- Menteri PANRB menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dimintakan pendapat **paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya**
- Pendapat Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri PANRB **paling lambat akhir bulan Mei tahun sebelumnya**
- Pertimbangan teknis Kepala BKN disampaikan kepada Menteri PANRB **paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya**
- Menteri PANRB menetapkan kebutuhan ASN setiap Instansi Pemerintah **paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.**

Siklus Tahun 2021



Siklus Tahun 2022



APARATUR SIPIL NEGARA MELIPUTI PNS DAN PPPK

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS



PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK

PNS & PPPK:

- MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN
- MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN

KEBIJAKAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN



PENETAPAN KEBUTUHAN ASN

CPNS

PP Manajemen PNS | No. 11 Th. 2017 Ps. 8

Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan:

- Analisis jabatan
- Analisis beban kerja
- Peta jabatan
- Memperhatikan:
 - kondisi geografis daerah
 - jumlah penduduk
 - anggaran belanja pegawai

PPPK

PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 4

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK

- Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
- Untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun
- Satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS
- Ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB

PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 5

PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri PANRB kebutuhan JPT utama/madya tertentu untuk PPPK.

PP Manajemen PNS | No. 11 Th. 2017 Ps. 8
PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 4

Kebutuhan ASN (PNS/PPPK) secara nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahun, memperhatikan:

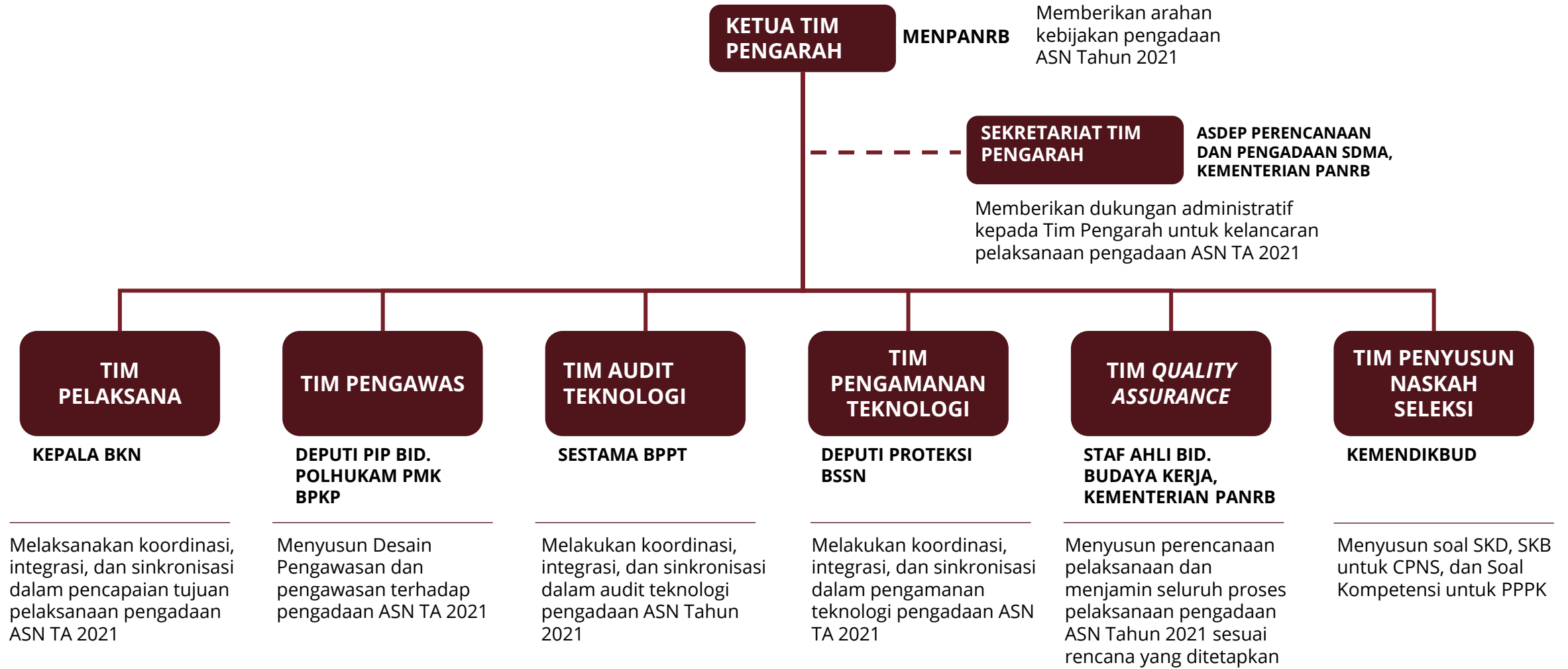
- Pendapat Menteri Keuangan
- Pertimbangan teknis Kepala BKN

MEKANISME PENGADAAN ASN



Analisis Jabatan
Analisis Beban Kerja





STATUS PENGUSULAN KEBUTUHAN ASN 2021



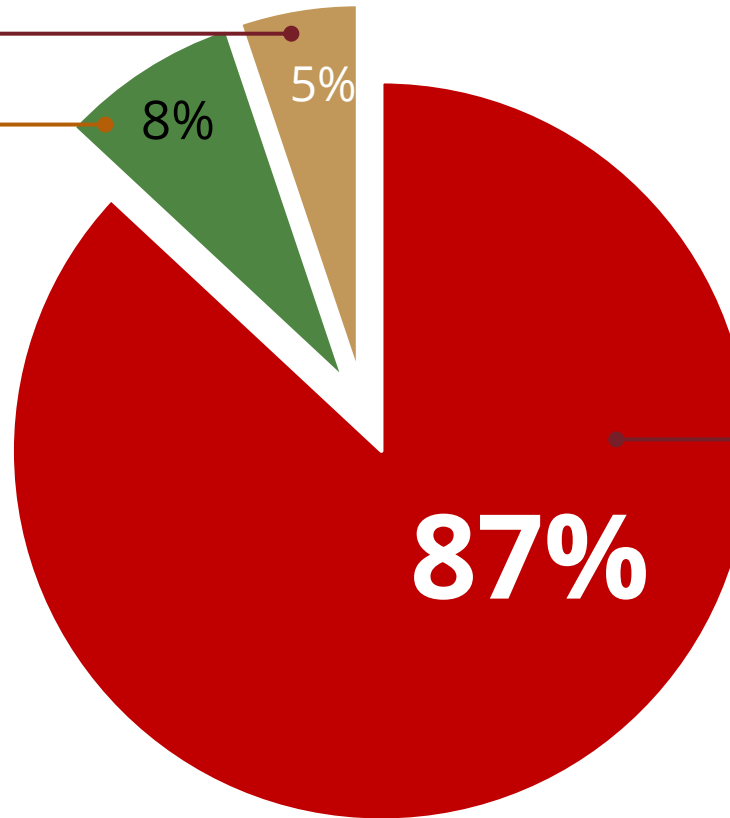
32 Instansi
TIDAK USUL

22 Kementerian/Lembaga

10 Pemerintah Kabupaten/Kota

49 Instansi
**SUDAH USUL
NAMUN PERLU MELENGKAPI DOKUMEN**

49 Pemerintah Kabupaten/Kota



539 Instansi
SUDAH USUL DAN DOKUMEN LENGKAP

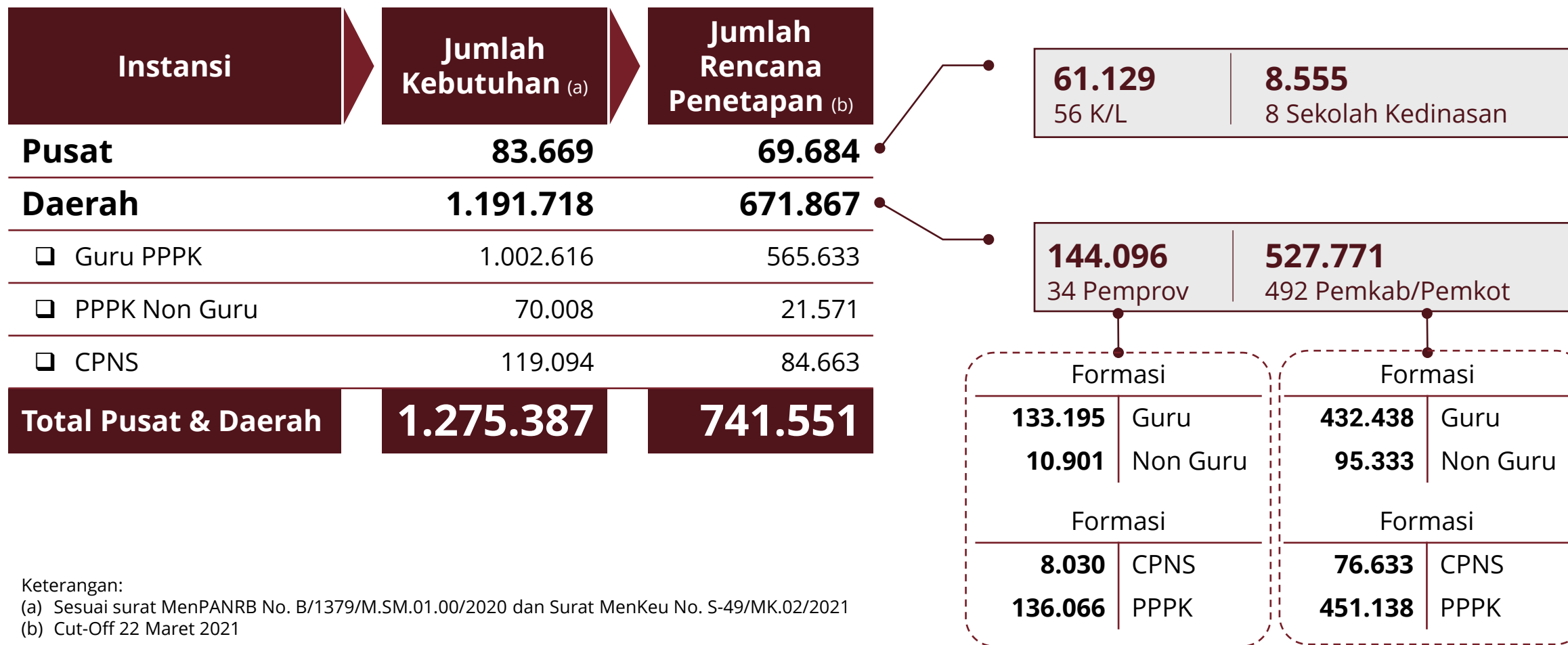
56 Kementerian/Lembaga

34 Pemerintah Provinsi

449 Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan:
Cut-Off 22 Maret 2021

RENCANA PENETAPAN KEBUTUHAN ASN 2021



JABATAN DENGAN ALOKASI PENETAPAN KEBUTUHAN TERBANYAK TAHUN 2021

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



PEMERINTAH PUSAT

- 1 Dosen
- 2 Penjaga Tahanan
- 3 Penyuluh KB
- 4 Analis Perkara Peradilan
- 5 Pemeriksa
- 6 Perawat
- 7 Analis Hukum Pertanahan
- 8 Jaksa
- 9 Dokter
- 10 Statistisi
- 11 Pranata Komputer
- 12 Pranata Barang Bukti
- 13 Pengawas Farmasi dan Makanan
- 14 Penyuluh Perikanan
- 15 Perencana

PEMERINTAH PROVINSI

JABATAN GURU

- 1 Guru BK
- 2 Guru TIK
- 3 Guru Matematika
- 4 Guru Seni Budaya
- 5 Guru Bahasa Indonesia

JABATAN TENAGA KESEHATAN

- 1 Perawat
- 2 Dokter
- 3 Asisten Apoteker
- 4 Perekam Medis
- 5 Apoteker

JABATAN TEKNIS

- 1 Pranata Komputer
- 2 Polisi Kehutanan
- 3 Pengawas Benih Tanaman
- 4 Pengelola Keuangan
- 5 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

JABATAN GURU

- 1 Guru Kelas
- 2 Guru Penjasorkes
- 3 Guru BK
- 4 Guru TIK
- 5 Guru Seni Budaya

JABATAN TENAGA KESEHATAN

- 1 Perawat
- 2 Bidan
- 3 Dokter
- 4 Apoteker
- 5 Pranata Laboratorium Kesehatan

JABATAN TEKNIS

- 1 Penyuluh Pertanian
- 2 Auditor
- 3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- 4 Pengelola Keuangan
- 5 Verifikator Keuangan

RENCANA JADWAL (TENTATIVE)

SELEKSI CASN TAHUN 2021

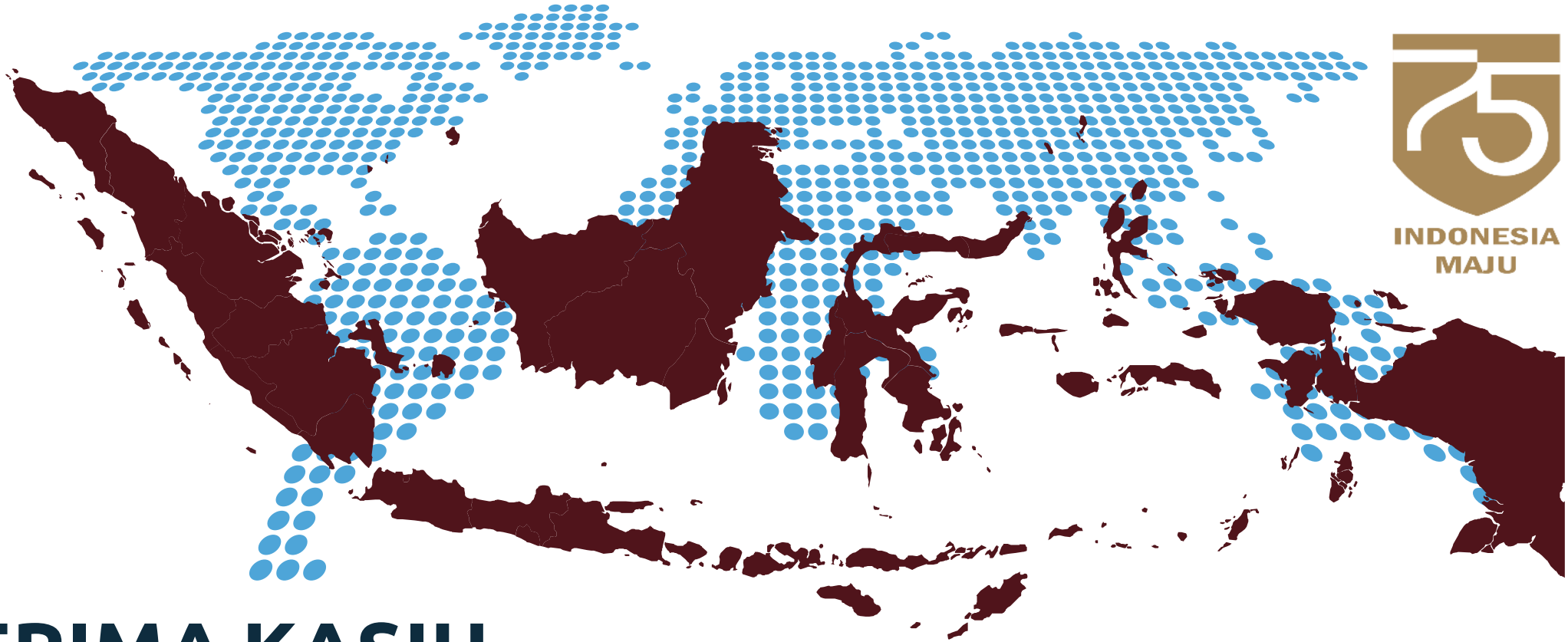
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



No	Kegiatan	2021										2022	Ket
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	
SEKOLAH KEDINASAN													
1	Penyampaian formasi ke K/L												MENPANRB
2	Pendaftaran												8 K/L
3	Seleksi												CAT BKN
4	Pengumuman kelulusan												8 K/L
CPNS DAN PPPK (NON GURU)													
1	Penyampaian formasi ke K/L Pemda												MENPANRB
2	Pendaftaran												SSCASN BKN
3	Seleksi												CAT BKN
4	Pengumuman kelulusan												K/L/Pemda
5	Pemberkasan dan Penetapan NIP												BKN
PPPK (GURU)													
1	Penyampaian formasi ke Pemda												MENPANRB
2	Pendaftaran												SSCASN BKN
3	Seleksi (Tahap I)												CAT UNBK
4	Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP												BKN
5	Seleksi (Tahap II)												CAT UNBK
6	Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP												BKN
7	Seleksi (Tahap III)												CAT UNBK
8	Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP												BKN



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



INDONESIA
MAJU

TERIMA KASIH



[kempnrb](#)



[kemenpanrb](#)



[Kementerian-PANRB](#)

DISCLAIMER:

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.